

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN
MAMUJU PERIODE 1995 - 2004**

*Some Factors Affecting Market Retribution Revenue In Mamuju
Regency From 1995 To 2004*

MUH. YASIR FATTAH



**MAGISTER KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN
MAMUJU PERIODE 1995 – 2004**

*Some Factors Affecting Market Retribution Revenue In Mamuju
Regency From 1995 To 2004*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Manajemen Keuangan Daerah**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. YASIR FATTAH

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN
MAMUJU PERIODE 1995 - 2004

Disusun dan diajukan Oleh

Muh. Yasir Fattah
Nomor Pokok : P2600205521

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 1 Maret 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA
Ketua

Halia, SE., M.Si., AK
Anggota

Mengetahui,

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA

Prof. Dr. dr. A. Rasak Thaha, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Yasir Fattah

Nomor Mahasiswa : P2600205521

Program Studi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2007

M. Yasir Fattah

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan pikiran tetapi mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ditemui, baik dari segi bahasa maupun teknis penulisan. Karena itu, dengan senang hati penulis mengharapkan saran dan kritikan semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang dimaksud.

Penulisan tesis ini mulai dari penelitian, penyusunan, sampai berbagai hambatan yang dihadapi. Namun atas dorongan dan bimbingan dari semua pihak baik moril maupun material, hambatan tersebut dapat diatasi secara baik. Karena itu, pada tempatnyalah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA. selaku ketua komisi penasehat dan Halia, SE., M.Si., AK sebagai anggota komisi penasihat yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih yang sama tak lupa disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. dr. A. Rasak Thaha, M.Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin bersama Asisten Direktur I dan II, serta segenap Civitas Akademika Progam Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Anggota Tim Penguji khususnya Bapak Dr. H. Madris, DPS., M.Si, Drs. A. Kahar Akil, MS, Dra. Hj. Mediaty, M.Si., AK.

4. Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya Bapak Bupati Drs. H. Suhardi Duka, MM dan seluruh staf yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian diwilayahnya .
5. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM.
6. Kepala BPKD Kabupaten Mamuju Drs. H. Adrian Haruna, MM., MBA. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Program Pasacasarjana.
7. Bapak Prof. Dr. H. A. Karim Saleh, MS selaku ketua pelaksana Magister Keuangan Daerah.
8. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA selaku ketua program Magister Keuangan Daerah.
9. Kepada kedua orang tua penulis H. Abd. Fattah, BBA dan Hj. St. Fatimah (alm) atas doa yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Segenap rekan mahasiswa Program Studi Magister Keuangan Daerah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas dorongan semangat dan kerjasamanya.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa bangga, kagum, dan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Suraeni Y dan putra-putri tercinta Jihan Fadila Y, M. Raihan Atallah Y, dan Nabila Ramadani Y atas segala pengorbanan, kesabaran, kesetiaan, dan do'anya sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan segala bantuan, petunjuk, saran, dorongan, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak senantiasa mendapat balasan berupa berkah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, Amin.

Makassar, Februari 2007

M. Yasir Fattah

ABSTRAK

M. YASIR FATTAH . *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Mamuju Periode 1995 - 2004* (dibimbing oleh **Rahmatia** dan **Halia**).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Berapa besar pencapaian potensi dan target dibanding realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju (2) apakah faktor PDRB, jumlah penduduk serta sarana pasar mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dengan memilih beberapa pasar di Kabupaten Mamuju yaitu pasar di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Budong-Budong, dan Kecamatan Topoyo pada bulan Agustus sampai November 2006. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar serta analisis korelasi dan regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya potensi penerimaan retribusi pasar yang diperoleh di Kabupaten Mamuju periode 1994 – 2004 rata-rata sebesar Rp 871.860.482.5,-. Sedangkan target penerimaan retribusi pasar rata-rata selama periode yang sama sebesar Rp. 718.684.476.7 sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar. Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk mempunyai hubungan positif namun tidak signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar. Sedangkan sarana pasar mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar.

ABSTRACT

M. YASIR FATTAH. *Some Factors Affecting Market Retribution Revenue in Mamuju Regency From 1995 to 2004* (Supervised by **Rahmatia** and **Halia**).

This research aimed to find out to what extent the potency achievement and target in the sector of market retribution revenue realization in Mamuju Regency; and whether gross regional domestic product, number of population, and market facilities have influence on market retribution revenue in Mamuju Regency.

This research was carried out in some markets in Mamuju Regency such as in the markets in Mamuju District, papalang District, Budong-budong District, and Topoyo District from August to November, 2006. The data were obtained through observation, interview and questionnaire. They were then analyzed using correlation and regression models.

The result show that the amount of market retribution revenue potency in Mamuju Regency from 1994 to 2004 is Rp.871.860.482,5,- on average. Mean while the target of market retribution revenue in the same period, which is Rp. 781.684.476,7,- on average, has influence on realization of market retribution revenue. Gross regional Domestic product has a positive correlation to realization of market retribution revenue but it does not have a significant influence on it. On the other hand market facilities have a positive correlation and significant influence on realization of market retribution revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Manajemen	9
B. Pengertian Retribusi	12
C. Peranan Retribusi Pasar	20
D. Pengertian Pasar	22
E. Pertumbuhan Ekonomi	26
F. Hasil Penelitian Sebelumnya	29
G. Kerangka Pikir	35
H. Hipotesis	39

III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis	42
F. Definisi Operasional	44
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	46
B. Faktor-faktor Non Ekonomis yang Berhubungan Dengan Penerimaan Retribusi Pasar	53
C. Potensi Penerimaan Retribusi	62
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar	65
V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju tahun 2004	47
2.	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Jelamin Di Kabupaten Mamuju tahun 2000 – 2004	48
3.	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Mamuju Tahun 2004	49
4.	Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Per Kecamatan Di Kabupaten Mamuju tahun 2004	50
5.	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamuju Tahun 2004	51
6.	Penduduk Usia kerja Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut jenis Kegiatan Dirinci Menurut jenis Kelamin Di Kabupaten Mamuju Tahun 2004.	52
7.	Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Mamuju Tahun 2004	53
8.	Potensi Objek retribusi Pasar di kabupaten Mamuju	55
9.	Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dari Sarana Pasar di Kabupaten Mamuju Tahun 2004	56
10.	Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Jenis Dagangan Berdasarkan Tarif Harian Pada PD Pasar Kabupaten Mamuju	60
11.	Potensi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Mamuju	63
12.	Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Mamuju Tahun 1995 – 2004	64
13.	PDRB Kabupaten Mamuju Tahun 1995 – 2004 Berdasarkan Harga Konstan 1993	66

14.	Perkembangan Jumlah Penduduk kabupaten Mamuju dari Tahun 1995 – 2004	67
15.	Perkembangan Anggaran Sarana Pasar (Kios dan Lods) dari Tahun 1995 – 2004	69
16.	Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan Variabel Retribusi Pasar (Y), PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2), dan Prasarana Pasar (X_3)	70

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kegunaan Manajemen	11
2. Kerangka pikir "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Mamuju Periode 1995 – 2004"	38
3. Alur Pemungutan Retribusi Pasar Harian Pada PD Pasar Kabupaten Mamuju	57
4. Alur Pemungutan Retribusi Pasar Bulanan Pada PD Pasar Kabupaten Mamuju	59

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Data Analisis SPSS Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, dan Sarana Pasar Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Mamuju	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan membangun, sampai saat ini masih tetap memprioritaskan pembangunan di daerah, karena pembangunan daerah merupakan suatu sub sistem dari sistem pembangunan nasional, oleh karena itu strategi pembangunan daerah senantiasa harus disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat (Kaho, 1995).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, fungsi distribusi yang

meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Mahi, 2000).

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dalam rangka usaha untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, maka perlu ditingkatkan penghasilan kelompok-kelompok masyarakat yang

mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang rendah, demikian pula halnya para pedagang kecil serta para petani mendapat kesempatan yang seluas-luasnya dalam hal menambah produksi melalui perbaikan sistem pertanian dan pemupukan yang memadai, dengan jaminan bahwa hasil produksi mereka akan ditampung oleh pasar dan dilain pihak bidang industripun turut ditingkatkan, baik industri kecil maupun industri besar, dengan demikian akan membuka kesempatan kerja dan peningkatan dibidang ekonomi.

Suatu kenyataan bahwa bidang ekonomi merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara atau bangsa. Kenyataan lain pula bahwa pada umumnya di negara sedang berkembang terjadi urbanisasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota besar, salah satu penyebabnya adalah sistem perekonomian kota lebih tinggi dari pada sistem perekonomian pedesaan, maka dengan demikian banyak fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh di kota dibandingkan dengan di desa.

Kebijaksanaan untuk memberi peran yang lebih besar kepada daerah tingkat II (otonomi daerah) sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada pemerintah kota dan kabupaten untuk menyediakan dana yang lebih besar. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah di era otonomi dilakukan secara efisien dan efektif sehingga pemerintah kota atau kabupaten dapat melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan kualitas yang memadai.

Kondisi keuangan pemerintah kota atau kabupaten yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tampaknya belum bisa diandalkan

sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka desentralisasi karena: *pertama*, relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor No. 34 tahun 2000 (perubahan atau perbaikan atas UU No. 18 Tahun 1997), tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Bagian Laba Perusahaan Daerah (BUMD), beberapa jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kewenangan pemerintah kota atau kabupaten memiliki basis pungutan yang relatif kecil, dan sifatnya bervariasi antar daerah, sehingga pemerintah kota atau kabupaten tidak leluasa dalam memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi; *kedua*: ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Banyaknya bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat akan mengurangi usaha atau inisiatif daerah dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasi terhadap pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan; *ketiga*: kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih lemah, karena rendahnya kemampuan dalam mengadministrasikan pemungutan pajak/retribusi daerah maka dapat menyebabkan pengelolaan pendapatan daerah kurang efektif dan efisien, kendatipun masih menyimpan potensi yang cukup besar; *keempat*: kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Kegiatan perencanaan dan pengawasan yang lemah dapat dilihat pada dua tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan target penerimaan daerah dari sumber pajak dan retribusi yang menurut kebiasaan pemerintah daerah menggunakan sistem *incremental* dan belum disesuaikan dengan potensi yang sebenarnya, sehingga akan berdampak pada rendahnya target penerimaan dalam APBD. Tahap kedua adalah tahap pengawasan yaitu mulai dari kegiatan pengumpulan

realisasi PAD, sampai dengan penyetoran ke kas daerah. Kegagalan pada tahap ini akan berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan APBD, yang akan berdampak pada tertundanya beberapa jenis kegiatan yang telah direncanakan. Demikian pula dalam pembelanjaan, unsur pengawasan masih tetap diperlukan sehingga pemanfaatan keuangan daerah benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah/kota. Oleh karena itu, peranan pemerintahan daerah akan semakin penting. Di samping mengelola dana bantuan dari pusat secara efektif dan efisien, juga harus dapat mencari dan menggali dana sendiri dengan memanfaatkan semua potensi daerah secara maksimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan,

kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pengangkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang sangat potensial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Santoso (1995) bahwa pasar selain tempat pendistribusian barang dan jasa, sebagai tempat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga berfungsi sebagai lahan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi pasar.

Pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi di daerah. Pasar yang tidak berfungsi dengan baik akan merupakan masalah bagi daerah tempat pasar itu berada. Pengadaan barang kebutuhan konsumen yang tidak stabil, baik kualitas dan kuantitasnya menyebabkan harga menjadi tidak stabil dan kemungkinan besar juga akan mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung (Bustaman, dkk, 1991).

Masalah yang sering timbul di pasar adalah para pelaku sektor informal. Mereka sering menjadi sumber kemacetan, kekumuhan, masalah kebersihan dan

keamanan. Kehadiran pelaku sektor informal bahkan sering dianggap penyebab berbagai kesemrawutan, khususnya area pasar yang menempati ruang kosong, pelataran, tempat strategi di depan kios/toko dan bahkan lorong atau gang antara los serta pintu masuk dan keluar. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti kesemrawutan penempatan per unit jenis usaha dan barang dagangan karena tidak sesuai lagi dengan tempat peruntukannya.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju adalah mengapa retribusi pasar sangat kecil dan tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar di Kabupaten Mamuju. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi tentang upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar pencapaian potensi dan target dibanding realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju.
2. Apakah faktor PDRB, jumlah penduduk, dan sarana pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju?
3. Apakah ada perbedaan antara sebelum menjadi Ibukota dan setelah menjadi Ibukota terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui besarnya pencapaian antara potensi dan target dibanding realisasi penerimaan yang diperoleh dari retribusi pasar di Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui apakah faktor PDRB, jumlah penduduk serta sarana pasar mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan retribusi pasar sebelum dan sesudah menjadi Ibukota Provinsi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perusahaan Pasar Kabupaten Mamuju dalam mengambil kebijakan penentuan target retribusi pasar yang ingin dicapai pada tahun Anggaran yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan masalah dalam pemungutan retribusi sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalah.
3. Sebagai bahan masukan bagi calon peneliti yang berminat mengkaji lebih jauh menyangkut pengelolaan retribusi pasar.
4. Sebagai wahana perpustakaan untuk pengembangan ilmu dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen

Manajemen dimaksudkan sebagai pemanfaatan yang sebaik mungkin dari sumberdaya yang terbatas jumlahnya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal untuk mencapai sekumpulan tujuan. Manajemen sekaligus merupakan suatu proses yang dinamis meliputi tanggungjawab untuk mengefektifkan operasi suatu bisnis. Tanggungjawab ini meliputi seluruh penempatan dan implementasi prosedur-prosedur yang dapat memastikan menyatunya perencanaan dan penyeleksian, bimbingan, motivasi dan kontrol orang-orang yang terlibat dalam bisnis.

Westra (1983) mengemukakan bahwa manajemen yaitu pergerakan, pengorganisasian dan pengerahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen dalam suatu organisasi dapat mempergunakan cara sebagai berikut; (1) merencanakan kebutuhan informasi sesuai dengan pimpinan, pelaksanaan dan pemakai yang berwenang mengambil keputusan, (2) menyediakan bahan-bahan yang diinginkan untuk dicapai, (3) memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan serta dilakukan secara efisien dan efektif, (4) meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas, (5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses dan hasil-hasil pelaksanaan di lapangan dan (6) pelaksanaan yang lancar, terarah serta tepat waktu.

Menurut Terry (1986) manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Newman (1987), melihat manajemen dari fungsinya. Untuk itu, ia membagi pekerjaan administrator ke dalam 5 proses, yaitu; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengumpulan sumber, (4) pengendalian kerja (5) pengawasan.

Perencanaan termasuk di atas, meliputi rangkaian keputusan termasuk penentuan tujuan, pengambilan kebijakan, penyusunan program, penentuan metode dan prosedur, serta penetapan jadwal waktu pelaksanaan. Pengorganisasian meliputi pengelompokan kegiatan dalam unit-unit untuk pelaksanaan rencana, dan penetapan hubungan antara pimpinan dan bawahan-bawahannya pada tiap-tiap unit.

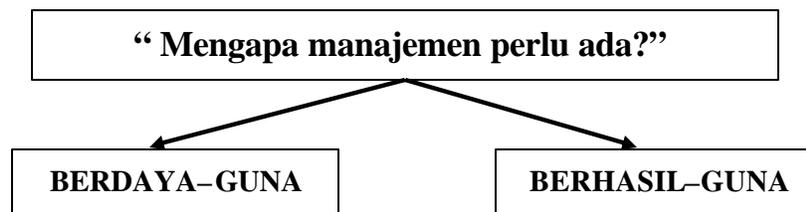
Pengumpulan sumber meliputi: perekrutan personel, penyediaan kapasitas, penyediaan alat, fasilitas dan keperluan lainnya untuk pelaksanaan rencana. Pengendalian kerja, meliputi: pemberian bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini termasuk pemberian instruksi untuk memotivasi mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan berbagai tugas, serta memelihara hubungan kerja antara atasan dan bawahan.

Pengawasan, dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh adanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, berikut hasil-hasil yang dicapai. Untuk itu diupayakan agar pelaksanaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana.

Sarwoto (1985) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk menggerakkan organisasi. Tanpa adanya manajemen yang efektif, maka tidak akan ada usaha yang berhasil. Tercapainya tujuan organisasi baik untuk

tujuan ekonomi, sosial atau politik, sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam organisasi tersebut.

Menurut Azhar Arsyad (2003) Manajemen membahas tentang bagaimana para manajer berusaha agar sesuatu dikerjakan dengan baik (bersama dengan atau oleh orang lain). Bila dikaitkan dengan “politik dan kekuasaan dalam suatu organisasi”, itu berarti bagaimana menerapkan kekuasaan agar orang lain sudi melakukan sesuatu. Itu juga berarti bagaimana menerapkan kekuasaan agar orang lain terpengaruh melakukan sesuatu.



Gambar 1. Kegunaan Manajemen

Manajemen dibutuhkan agar suatu kelompok dapat mencapai tujuannya secara berdayaguna dan berhasil-guna.

- ? Berhasil guna maksudnya berhasil mencapai apa yang diinginkan, dan hasilnya berguna bagi kelompok dan masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya bagi sesama manusia.
- ? Berdaya-guna maksudnya agar sumber-sumber seperti daya, dana, dan sarana digunakan sehemat mungkin dan dalam waktu yang tepat dan dapat dicapai hasil sesuai dengan rencana.

Seorang ahli manajemen di Amerika Joseph L. Massie (1987:3), mengungkapkan secara sederhana bahwa manajemen adalah “*gets things done through other people*” melaksanakan sesuatu hal melalui orang lain. Ungkapan ini diperhalus sendiri menjadi “Suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama.

Proses tersebut mencakup tehnik-tehnik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama.”

Modul yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (1993), merangkum sebuah definisi manajemen : “Manajemen adalah proses atau kegiatan orang-orang dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber (juga disebut unsur manajemen yaitu daya manusia, dana atau sumber keuangan, dan sarana atau perangkat kerja, termasuk di dalamnya metoda/teknologi dan material/bahan-bahan) yang tersedia bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga berarti keterampilan dan kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan bersama orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Pengertian Retribusi

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut,

antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa langsung yang diterima dengan adanya pembayaran retribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi (disebut juga dengan bea daerah), adalah suatu pungutan daerah, yang diperuntukkan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah yang langsung maupun jasa yang diberikan secara tidak langsung. (Kaho, 1995). Selanjutnya juga disebutkan bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah.
2. Dalam pemungutannya terdapat pelaksanaan secara ekonomis.
3. Adanya kontra prestasi secara logis dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

Benyamin Harits (1995:84) mengemukakan pungutan retribusi memiliki sifat-sifat tertentu yaitu:

1. Dapat dipaksakan akan tetapi dengan pertimbangan ekonomi.
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar.

3. Meskipun ada persyaratan-persyaratan formal dan material, masih diberikan alternatif untuk mempertimbangkan kemampuan membayar.
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya tanpa menonjolkan anggaran.
5. Dal hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Sedangkan menurut Widjaya (1992 : 80), retribusi harga dan suatu pelayanan langsung (cost recol) dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelaksanaannya harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai besarnya retribusi yang ditarik.

Menurut (UU RI No. 34 Tahun 2000 : 18), retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berbeda halnya dengan pajak yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas daerah, retribusi mempunyai hubungan langsung dengan kontraprestasi yang diberikan daerah karena pembayaran tersebut memang secara khusus dimaksudkan untuk mendapatkan suatu prestasi dari daerah yang dapat dinikmati secara perorangan.

Pengenaan retribusi didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku umum, pelaksanaan pemungutannya bersifat ekonomis, artinya pihak-pihak yang bersangkutan bebas untuk membayar atau tidak, tetapi bilamana tidak membayar, maka mereka tidak akan mendapatkan fasilitas tertentu dari negara atau daerah.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam retribusi sebagai berikut :

1. Jasa, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa umum, yaitu berupa jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Perizinan, yaitu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, objek retribusi adalah jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

A. Retribusi Jasa Umum

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan
- Retribusi Penggajian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman umum dan penguburan mayat
- Retribusi parkir ditepi jalan umum
- **Retribusi pasar**

- Retribusi air bersih
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan

B. Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penitipan anak
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- Retribusi penyedotan septiteng (kakus)
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- Retribusi tempat pendaratan kapal
- Retribusi tempat penyeberangan di atas air
- Retribusi pengolahan limbah cair
- Retribusi penjualan produk usaha daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
- Retribusi izin mendirikan bangunan
- Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek

- Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi di dasarkan pada :

1. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah untuk mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi jasa usaha, ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin tertentu.

Kristiadi (1985) mengemukakan beberapa hal yang sangat penting dalam pemungutan retribusi daerah yaitu :

1. Adanya pelayanan secara langsung diberikan sebagai imbalan dari pungutan yang dikenakan.
2. Adanya kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Harga pelayanan atau ongkos pelayanan tidak melebihi pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Davey (1988) menyatakan bahwa dasar dan pengenaan tarif retribusi adalah *cost recovery*. Kebijakan mengenai besarnya retribusi dapat dilakukan dengan *full cost* atau kurang dan *full cost* yang melibatkan kontribusi tertentu atau dibebankan kepada penerimaan umum secara berturut-turut. Apa yang dikemukakan tersebut, muncul beberapa masalah seperti :

1. Dalam menentukan jenis pengeluaran berhubungan secara langsung dengan biaya yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan.

2. Bagaimana menghasilkan biaya yang dikeluarkan, apakah besarnya dapat disesuaikan dengan pengeluaran yang sebenarnya dari suatu unit pelayanan tertentu atau didasarkan pada rata-rata pelayanan.
3. Dalam memperhatikan besarnya biaya, apakah biaya modal akan dimasukkan dan jika dimasukkan apa dasarnya, sebab biaya modal dipenuhi oleh penerimaan umum dan atau pinjaman yang sepenuhnya telah disalurkan. Oleh karena itu biasanya yang dibebankan kepada konsumen adalah biaya pemeliharaan dan biaya pengoperasian.

Ketiga masalah tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pengenaan retribusi dengan menggunakan variasi-variasi tertentu dalam pengenaan retribusi.

Devas (1989) menyebutkan bahwa kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah, berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini perorangan bebas menentukan besar layanan yang hendak dinikmati, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan, karena itu harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersifat pribadi, dengan kata lain bahwa untuk barang dan layanan semacam ini besar konsumsinya menurut keadaan harga.

Perbedaan antara barang pribadi dan barang umum tidak mudah dilakukan karena ada pula layanan yang bersifat campuran. Dalam praktek, pungutan retribusi secara langsung terhadap konsumen biasanya dikenakan atas dasar pertimbangan sebagai berikut.:

1. Bahwa pelayanan yang terjadi dapat disediakan pada setiap orang dan oleh karenanya tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut, contoh pendidikan.
2. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat, seperti resep dokter.
3. Mungkin terdapat variasi di dalam konsumsi individual yang berkaitan setidaknya tidaknya untuk memilih, seperti fasilitas rekreasi.
4. Retribusi dapat menjadi arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa dimana kebutuhan pokok adalah bentuk-bentuk dan standar dari penyediaan yang tidak dapat dengan tegas ditentukan.

Evaluasi tentang retribusi sebagai sumber pendapatan Pemerintah daerah dapat dilihat dalam 3 (tiga) segi yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitasnya; retribusi pada dasarnya memiliki sifat yang kurang elastis terhadap perubahan perekonomian secara makro. Hal ini disebabkan karena hampir semua penetapan retribusi hanya didasarkan pada tarif per unit, pelayanan yang besarnya relatif tetap. Jadi perubahan tarif retribusi tidak dapat dilakukan secara otomatis sesuai dengan tinggi rendahnya laju inflasi, perkembangan perekonomian (PDRB), dan penduduk.
2. Keadilan; retribusi dalam penetapan tarif, biasanya cenderung bersifat "regresif" karena retribusi dikenakan pada unit pelayanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Ditinjau dari segi administrasi, secara teoritis retribusi relatif sederhana dan mudah dipungut dengan biaya yang relatif rendah. Kemudian dalam pemungutan retribusi didasarkan oleh tingkat konsumsi yang mudah diukur, sehingga pemakai hanya membayar apa yang telah dikonsumsi. Salah satu

kelemahan retribusi adalah sulitnya menentukan target yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi pasar sangat tergantung pada jumlah jasa yang dikonsumsi masyarakat. Melakukan penetapan besarnya taksiran penerimaan pajak akan lebih mudah, karena obyek pajak dan wajib pajak dapat diidentifikasi secara lebih baik.

Dalam hubungan dengan penerimaan retribusi, menurut Prawiro (1990:12), terdapat empat penentu atau kunci sukses yang bila kita tidak menangani secara sungguh-sungguh dan baik akan berbalik menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Sistem yang baik, yaitu menyangkut perangkat Undang-Undang dan Peraturan maupun aparat pelaksanaannya.
2. Sistem penunjang, misalnya sistem pembukuan, pencatatan akuntansi dan profesionalisme.
3. Faktor ekstern berupa faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. Masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya tingkat kesadaran dan kepatuhan.

C. Peranan Retribusi Pasar

Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial dan dapat diharapkan menunjang PAD adalah retribusi pasar, yaitu penerimaan dari sewa los, kios dan pelataran pasar. Untuk itu pengelolaan retribusi pasar haruslah dilakukan secara profesional dan baik selain dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna pasar.

Pemerintah Daerah cenderung menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah baru tanpa disertai perubahan paradigma tentang manajemen kualitas pelayanan masyarakat. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena upaya penciptaan sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang terkadang merangsang peningkatan pendapatan perkapita penduduk malahan membebani masyarakat dengan bertambahnya jenis pungutan.

Dalam konteks masyarakat modern masyarakat telah sibuk dengan aktifitas kesehariannya dalam memenuhi kebutuhan sehingga waktu yang tersedia dirasa sangat terbatas. Masyarakat cenderung membutuhkan waktu tunggu yang singkat untuk dilayani serta kualitas pelayanan yang prima. Masyarakat siap membayar mahal untuk memperoleh pelayanan terbaik. Kecepatan merespon suara hati pengguna jasa sangat terkait dengan kualitas layanan, tarif biaya pelayanan dan inovasi terhadap sistem serta prosedur layanan memungkinkan pengelolaan jasa layanan tercapai secara efektif dan efisien.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kelayakan ekonomi adalah kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan aktivitasnya, yakni dengan memperhatikan usulan David Osborne dan Geabler (1999) untuk mengembangkan entrepreneurial spirit dalam sektor publik sebagai upaya *reinventing government*. Menurut mereka semangat wira usaha tidak hanya dikonotasikan dengan pelaku bisnis, tapi juga amat mungkin diterapkan bagi para pelaku di birokrasi dan lembaga pemerintah lainnya. Seorang yang berprinsip bisnis akan selalu berupaya menggunakan sumberdaya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitasnya dan efektivitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka manajemen retribusi pasar haruslah berorientasi pada kepuasan pengguna fasilitas pasar, baik dari segi aksesibilitas

kelompok-kelompok penjual dan pembeli, diperlukan penataan pasar yang memadai dan ditunjang oleh tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja secara optimal. Petugas pengelola pasar adalah variabel yang menentukan kepuasan pengguna fasilitas pasar (penjual dan pembeli). Oleh karena itu selain lokasi yang memenuhi syarat aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan, maka petugas pengelola pasar juga memainkan peran penting dalam menunjang tercapainya ketiga indikator kepuasan pengguna fasilitas pasar. Apabila kepuasan pengguna pasar tercapai, maka akan timbul kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar sehingga dengan sendirinya retribusi pasar dapat ditingkatkan.

D. Pengertian Pasar

Pasar dalam pengertian sehari-hari yang kita kenal sebagai tempat jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari manusia, secara sederhana dapat pula diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Ini berarti pula bahwa di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa (Kasmir dan Jakfar, 2003). Lebih lanjut dikatakan bahwa pengertian pasar dapat lebih luas lagi yaitu pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi, tetapi cukup melalui sarana elektronik seperti telepon, faksimile atau melalui internet.

Ada pula yang mengartikan sebagai tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual, namun pengertian pasar di sini adalah pengertian pasar secara umum. Winardi (1988) mengemukakan bahwa pasar adalah:

1. Kelompok orang dan atau organisasi yang diidentifikasi oleh kebutuhan bersama dan dimana terdapat sumber-sumber daya guna memuaskan kebutuhan tersebut.
2. Tempat para pembeli dan penjual berkumpul untuk melaksanakan jual beli.
3. Tempat untuk memasarkan barang-barang atau jasa tertentu; melaksanakan perniagaan, membeli dan menjual untuk mencapai keuntungan.
4. Menurut tingkat hubungan timbal balik antara dua pasar yaitu: pasar antara, pasar pemandu dan pasar untuk barang-barang pengganti.
5. Menurut tingkat kemasakan produk yaitu: pasar untuk bahan mentah, bahan setengah olahan, barang perantara, dan barang jadi.

Pandangan lain mengenai pasar dikemukakan oleh Bustaman (1991) bahwa pasar adalah suatu pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda, jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi dapat disampaikan pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang telah ditetapkan. Dalam teori ekonomi dikemukakan bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual/produsen ke pasar pada setiap tingkat harga. Permintaan adalah keinginan untuk suatu produk pada setiap tingkat harga.

Menurut Assauri (2002: 136), para pembeli yang terdapat di pasar dapat dikelompokkan, kelompok mana akan mencerminkan jenis/tipe pasar yaitu :

(1). Pasar Konsumen (*consumer market*)

Pasar ini terdiri dari perorangan atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh produk (barang atau jasa) untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri dan tidak diperdagangkan.

(2) Pasar Produsen (*producer market*).

Pasar ini terdiri dari perorangan atau organisasi yang membeli atau memperoleh produk (barang atau jasa) untuk digunakan dalam proses produksi atau operasi lebih lanjut, yang kemudian hasilnya dijual atau disewakan kepada pihak lain.

(3). Pasar Pedagang (*reseller market*).

Pasar ini terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut pedagang besar (*wholesalers*), pengecer (*retailer*) dan pedagang perantara lainnya, yang membeli produk (barang atau jasa) untuk dijual lagi kepada produsen, pedagang lainnya atau konsumen akhir.

(4). Pasar Pemerintah (*government market*).

Pasar ini terdiri dari instansi pemerintah, yang membeli atau menyewa produk untuk membantu atau melaksanakan fungsi operasional dalam pemerintah.

Pada dasarnya pasar dapat dibedakan kedalam empat jenis/tipe pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau produsen dan konsumen, baik secara langsung maupun melalui perantara. Di satu pihak produsen menjual barangnya dan di lain pihak konsumen membelinya.

Menurut Suratman (2001), potensial pasar (*market potensial*) adalah peluang penjualan maksimum yang akan dicapai oleh seluruh penjualan baik saat ini maupun yang akan datang. Dengan kata lain potensi pasar adalah seluruh permintaan/kebutuhan konsumen yang didasarkan atas dua faktor: jumlah konsumen potensial dan daya beli. Selanjutnya dikemukakan bahwa setelah potensi pasar, peluang pasar, dan *market share* ditentukan langkah selanjutnya adalah mengkaji strategi dalam hal ini strategi pemasaran yaitu dalam rangka untuk meraih *market share* yang telah ditentukan. Peluang pasar yang ada dapat diperoleh dengan memperhatikan faktor persaingan dan perusahaan sejenis, terutama terhadap usaha yang telah ada dan kemungkinan tentang berdirinya usaha sejenis lainnya dimasa yang akan datang. Faktor-faktor yang perlu dipelajari dan diperhitungkan terhadap usaha sejenis yang telah ada adalah bagaimana kapasitas produksi mereka dan apakah mereka akan merencanakan mengisi peluang yang masih ada, bagaimana kesehatan perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya maupun besarnya peranan mereka dalam mengisi kebutuhan konsumen, bagaimana strategi pemasaran yang mereka lakukan baik dalam produk, harga, distribusi produk, maupun dalam kebijaksanaan promosi. Perlu pula diantisipasi tentang kemungkinan tentang adanya usaha sejenis lainnya yang membuka usaha dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam konteks penelitian, pasar adalah sarana/prasarana yang disediakan oleh pemerintah baik di desa ataupun kota yang bertujuan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan lain yang merupakan pemasukan bagi suatu daerah. Dalam upaya inilah suatu pasar harus memiliki fasilitas-fasilitas utama seperti los tempat berjualan, kios-kios, toko serta pelataran berjualan. Selain fasilitas utama tersebut, suatu unit pasar dapat juga didukung oleh fasilitas

penunjang seperti pelataran parkir dan MCK yang dapat dipungut retribusinya bagi pengguna fasilitas tersebut.

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.

E. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pengertian biasa, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat penambahan dan pendapatan nasional. Di dalam analisa ekonomi pengertian ini dipandang masih kurang sempurna karena dari satu tahun ketahun berikutnya, bersamaan dengan berlakunya penambahan dalam pendapatan nasional berlaku pula penambahan penduduk. Maka penambahan dalam kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional tersebut belum tentu meningkatkan taraf hidup penduduk. Oleh karena itu, Sadono Sukirno (1991:331) menjelaskan, "Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat penambahan dan pendapatan per kapita'.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai dua segi pengertian yang berbeda, yaitu istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa perekonomian pada suatu daerah telah mengalami perkembangan ekonomi dan

telah mencapai taraf kemakmuran. Dan istilah lain bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang. Perekonomian pada suatu daerah mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap pengguna faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga dapat meningkat.

Pertambahan penduduk dari masa ke masa juga dapat mendorong maupun menghambat perekonomian. Penduduk bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan suatu daerah/negara dapat menambah produksinya. Disamping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan bertambah tinggi sehingga produktivitasnya bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dan pertambahan tenaga kerja.

Selanjutnya patut diingat pula bahwa pengusaha adalah bagian dari penduduk. Para pengusaha memegang peranan penting dalam menentukan luasnya kegiatan ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu lebih banyak, maka lebih banyak pula kegiatan ekonomi akan dijalankan.

Dorongan lain yang akan timbul dari penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu luas pasar. Besarnya luas pasar tergantung pada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Apabila penduduk bertambah maka dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula.

Akibat buruk dari penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi masyarakat yang ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi yang tersedia, mengakibatkan produktivitas marginal penduduk rendah sekali. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi, atau walaupun bertambah, penambahan tersebut lambat sekali.

Sebagai tolak ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya adalah kemampuan dalam menggali, menghimpun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya, dalam hal ini prasarana pasar dan aparatur pengelola pasar tersebut, sehingga pergerakan ekonomi di sektor perdagangan dan sektor lainnya mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian, angka pertumbuhan ini semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian pada periode tertentu. Dalam hal ini jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas

produksi di dalam perekonomian daerah atau negara, berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Keadaan ekonomi dalam hal PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu tujuan perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pertumbuhan ekonomi dihitung dengan data PDRB perkapita atas dasar harga konstan, perubahan PDRB hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian daerah pada suatu periode tertentu, karena pertumbuhan dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

F. Hasil Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian tentang retribusi telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Santoso (1995) meneliti tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman, menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar sangat dipengaruhi oleh omzet penjualan. Semakin besar omzet penjualan para pedagang semakin memberi peluang untuk melakukan pembayaran retribusi pasar. Realisasi penerimaan retribusi pasar tahun anggaran 1991/1992 baru mencapai sekitar 48,8 persen dari potensinya. Penerimaan retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan, namun ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu : *pertama*, struktur tarif retribusi perlu dievaluasi agar besarnya dapat mencerminkan struktur biaya yang sebenarnya. Besarnya tarif yang telah ditetapkan belum merefleksikan struktur biaya jasa pengadaan fasilitas pasar;

kedua, bila retribusi pasar dikenakan terhadap setiap pedagang di pasar sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, maka dengan adanya kenaikan retribusi pasar, perlu diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas di pasar; *ketiga*, pemungutan retribusi pasar terhadap pedagang perlu dibedakan menurut skala usaha.

Nurdin dkk (1992) Sesuai dengan GBHN (1988) salah satu tujuan pembangunan perdagangan adalah penyebaran informasi pasar yang lebih merata. Untuk itu sejak tahun 1979/1980 telah dilakukan kegiatan penyebaran informasi aspek pemasaran hasil pertanian kepada petani produsen, pedagang, dan para konsumen. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala yang menyebabkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem informasi belum memuaskan. Karena sejak diadakan penyempurnaan Sistem Informasi Pasar pada tahun 1985-1992 belum pernah diadakan evaluasi secara formal, maka dilakukan penelitian untuk mengevaluasi Sistem Informasi Pasar di 6 propinsi yang mencakup 6 Kanwildepdag dan 11 Kandepdag Kabupaten/Kotamadya, yaitu di propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Jambi, Lampung dan Kalimantan Barat. Tujuan umum dari studi evaluasi sistem pelayanan informasi pasar adalah:

1. Mengadakan studi atas pelaksanaan, hambatan dan hasil yang telah dicapai dari pengembangan sistem informasi pasar yang telah dilaksanakan selama ini;
2. Menganalisis permasalahan yang timbul dari pelaksanaan sistem pelayanan informasi pasar;
3. Mencari konsep untuk melengkapi, memperbaiki dan menyempurnakan

sistem yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para pemakai jasa informasi pasar menurut perkembangan waktu, teknologi dan gerak serta pola perekonomian.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, lokakarya, observasi dan wawancara dengan aparat Departemen Perdagangan Daerah dan khalayak pemakai informasi. Analisis hasil temuan lapangan dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek pelaksana informasi dan pemakai informasi. Dari sisi pelaksana informasi:

1. Tingkat pendidikan para pelaksana informasi sebagian besar berpendidikan sarjana/sarjana muda. Sedangkan tingkat pendidikan para pengumpul data dan pengolah data relatif masih rendah (tamat SD, SLTP, SLTA dan Diploma/Perguruan Tinggi);
2. Hambatan yang dirasakan dalam penyebaran informasi bervariasi yaitu dana, waktu dan sasaran penyebaran;
3. Hambatan dalam pengumpulan data lebih banyak pada faktor dana, karena terbatasnya dana untuk kegiatan informasi pasar;
4. Hambatan pada pengolahan data adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang canggih seperti komputer bukan hanya memudahkan mengolah data, tetapi juga dapat disajikan pelayanan informasi pasar secara terpadu antar-Kabupaten/ Kodya dan bahkan antar-propinsi.

Dari sisi pemakai informasi:

1. Pemakai informasi adalah orang yang mempunyai usaha pada pertanian/produsen, pedagang besar/kecil, KUD/Koperasi pasar, serta pabrikan yang jenis usaha utama pada pertanian, industri, pertambangan.

2. Kesempatan berusaha bagi wanita dan pemuda masih kurang.
3. Tingkat pendidikan khalayak pemakai cukup baik, sebagian besar tamat SLTA dan Diploma/Perguruan Tinggi.
4. Aspek informasi yang diperlukan bukan saja aspek harga tetapi juga aspek non harga seperti transportasi, pergudangan, pengadaan dan musim dan aspek lainnya seperti permodalan dan pemasaran.
5. Informasi pasar dapat diketahui dari berbagai sumber dan keaktifan khalayak dalam mencari serta mendengar terutama dari televisi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pelaksana sistem informasi rata-rata adalah perguruan tinggi. Tetapi hal ini tidak didukung oleh prasarana yang memadai seperti kurangnya penyediaan komputer, meskipun penyebaran informasi yang paling efektif adalah melalui kombinasi saluran media cetak dan elektronik serta mendatangi pengguna informasi. Namun, ternyata media radio paling banyak dipakai oleh petugas penyebar informasi pasar.

Mardiasmo dan Makhfatih (2000) dalam penelitiannya tentang Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi pasar relatif bervariasi di setiap unit pasar, hal ini tergantung pada luas areal pasar, tingkat aktivitas, jumlah kios, jumlah lods, izin penempatan, dan jumlah pedagang lesehan yang ada di masing-masing pasar. Secara umum target penerimaan yang ditetapkan oleh Pemda pada masing-masing pasar masih relatif rendah dari potensi sebenarnya. Sebagai sektor usaha pasar memiliki karakteristik tersendiri baik itu pengunjung, pedagang, aturan yang berlaku dan jenis barang yang diperjualbelikan. Disisi pengunjung, banyak pasar yang beroperasi secara tradisional menyebabkan pola kunjungan ke pasar

mengikuti pola tradisional antara lain yang terjadi dalam kegiatan atau aktifitas pasar adalah masih berlakunya sistem pasaran sebagai patokan kegiatan. Potensi penerimaan dari masing-masing pasar, baik pasar umum maupun pasar hewan didasarkan atas informasi jumlah kios, loos dan pedagang lesehan yang berdagang, jumlah pedagang, luas pasar keseluruhan, jumlah hari pasar, jumlah pedagang pada saat ramai maupun pada saat sepi, jumlah hewan kecil, jumlah hewan besar, rata-rata retribusi yang dikenakan untuk setiap pedagang dan penerima retribusi setiap bulannya. Dari data tersebut formulasi perhitungannya digunakan model sebagai berikut :

$$Prp = \{ (S_{lk} \times r) + (S_{lk} \times st) + (S_{lk} \times sb) + (S_{ll} \times r) + (S_{ll} \times st) + (S_{ll} \times sb) + (S_{ls} \times r) + (S_{ls} \times st) + (S_{ls} \times sb) + (S_{hk} \times r) + (S_{hb} \times r) \} + Shpb \times 12 + ij$$

Di mana :

- Prp = Potensi retribusi pasar
- ll = Jumlah lods
- lk = Jumlah kios
- ls = jumlah pedagang lesehan
- hpb = Jumlah hari pasar buka perbulan
- r = retribusi pasar
- st = sewa tanah
- sb = sewa bangunan
- hk = hewan kecil
- hb = hewan besar
- ij = ijin penempatan

Donovan (2003) the number of open unemployment has increasing significantly. Unfortunately, this increasing has not balancing by increasing the

work opportunity of formal sector. At the end, they enter informal sector. Informal sector workers are the worker that has work alone; work with help by temporary worker, and family worker. Although informal sector avowed as a safety valve in economic which able to reserve most worker, however, the condition of informal sector is very apprehensive. Informal sector workers in trading (street and market vendors) still perceive as caused of irregularities, disorganized, and traffic jam. The objectives of this study is to picture out and getting detailed information about the condition of sphere work and the work of informal sector, especially street and market vendors. This study found that the policies of city government in organize market location and street vendors have create uncertainty in trading. There are inconsistencies in role or policy issued by city government both in role itself and in the implementation. There is no socialization of the role to the implementers both the management of market and vendors. It caused that there are implementer in the field create alone policy to smooth their duties. The implementation of policy/role which organize market and street vendors seems less effective since there are no monitoring and control of the policy/role with tightened, coherent, and continuously. Also, there are no tightened in managing vendors in market area and the surroundings. It caused the surroundings vendors tend to disturb the venture of vendors in market area. Market management tends to less maximize, since the fact only doing in draw out retribution fee. However, available vendors' organization can not play their role as it is.

Polipoke, 2002 yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar secara partial, sedangkan variabel

jumlah penduduk serta variabel jumlah lods dan kios berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

Rauf (2006) dalam penelitiannya tentang "Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten Sidrap" menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai rata-rata 17,15 persen selama sebelas tahun (1995-2005). Adapun faktor pendapatan masyarakat per kapita, prasarana pasar dan insentif petugas secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi nilai penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan uji simultan sebesar 99,6 persen.

G. Kerangka Pikir

Pemerintah Daerah dewasa ini terus berpacu untuk melaksanakan pembangunan di segala sektor berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang telah diatur secara berencana sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dikonkritkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah telah menerima penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari pemerintah pusat, konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan secara baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal

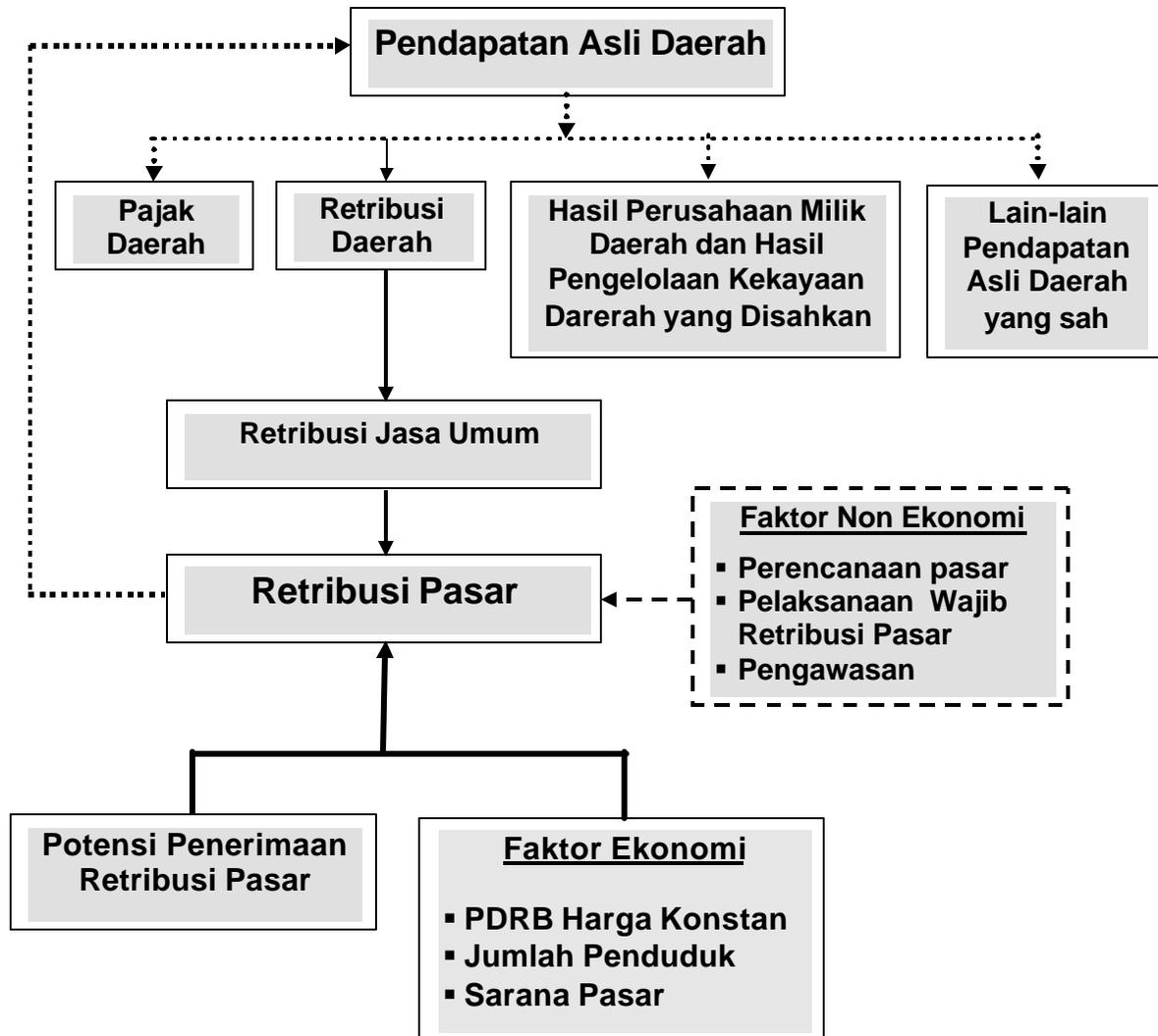
dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu serta jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana pasar oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (perdagangan dan pembeli) didukung oleh pengelolaan/pengawasan yang baik oleh aparat pemerintah daerah dan kondisi ekonomi yang stabil diharapkan penerimaan retribusi pasar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu aspek yang menunjang bagi berfungsinya atau tidaknya pasar adalah mekanisme perencanaan pasar, pelaksanaan dan pengawasannya sehingga Pemerintah Daerah dapat menentukan sasaran yang akan dicapai baik itu menyangkut perencanaan fisik, pengelompokan jenis dan jumlah pedagang, penentuan besarnya pendapatan dan pengeluaran, serta kewajiban, larangan, dan sanksi bagi penjual. Selain itu aktivitas aparat dalam menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan tanggung jawabnya sehingga mekanisme pengawasan yang dilakukan dapat menjamin agar segala sesuatunya berjalan menurut rencana

yang telah ditentukan, identifikasi masalah yang timbul serta pelaporan terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar diantaranya PDRB, jumlah penduduk, serta sarana pasar yang ada.

Penyediaan sarana dan prasarana pasar oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung oleh kinerja yang baik oleh aparatur pemerintah daerah dan kondisi ekonomi yang stabil diharapkan penerimaan retribusi pasar mampu memberi kontribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Secara skematis, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Kerangka Pikir Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Mamuju Periode 1995 – 2004

H. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di duga potensi dan target yang diperoleh lebih besar dari realisasi penerimaan retribusi pasar.
2. Di duga PDRB, jumlah penduduk, dan sarana pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.
3. Di duga ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah menjadi Ibukota Provinsi terhadap penerimaan retribusi pasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2006.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi maupun wawancara terstruktur dengan pengelola pasar dan para pejabat di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju guna memperoleh data primer yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal, laporan berkala serta dokumen dari berbagai instansi seperti, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju serta kantor Biro Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.